

Kertas kerja untuk Seminar
"Pendidikan Agama dan Sistem
Pendidikan Bangsa"

Jakarta, 28 - 31 Januari 1976

PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL

OLEH :

SOEDJATMOKO

PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL

oleh

Soedjatmoko

Sudah jelas bagi kita semuanya bahwa didalam masa pembangunan sekarang ini, ciri utama daripada kehidupan sosial ialah proses perubahan yang dialami masyarakat Indonesia. Proses perubahan masyarakat itu untuk sebagian terdiri dari perubahan-perubahan yang disengaja, yaitu perubahan-perubahan yang dituju secara sadar - yaitu usaha pembangunan kita- dan untuk sebagian terdiri dari perubahan-perubahan didalam masyarakat yang terjadi hampir-hampir secara otomatis dan yang hanya untuk sebagian dapat dikendalikan oleh masyarakat atau pemerintah.

Pembangunan kita merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum menuju masyarakat adil dan makmur, dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas, dan dengan merubah struktur masyarakat Indonesia dan memodernisasikan proses dan hubungan produksi sedemikian rupa sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat berkembang. Jaman kolonial telah mewariskan kepada kita suatu struktur sosial yang dualistis dan yang menunjukkan berbagai ketimpangan yang perlu diatasi sebelum kita dapat mewujudkan suatu ekonomi nasional yang mampu memenuhi keperluan seluruh masyarakat secara adil, yang mampu berkembang terus, dan yang mampu mengatasi ketergantungan yang tidak wajar dari dunia luar. Oleh karena itu usaha pembangunan tidak cukup hanya bertujuan peningkatan GNP, melainkan juga bertujuan transformasi struktural untuk menegakkan keadilan sosial, dengan jalan pembangunan daerah, pembangunan daerah pedesaan, dengan cara memaksimalkan kesempatan kerja, pengembangan dunia usaha nasional serta pengurangan beban dan hasil pembangunan, disamping pengembangan sektor modern. Tujuan-tujuan ini sudah tercermin dalam peralihan Repelita I ke Repelita ke II, dan agaknya akan menjadi lebih jelas lagi dalam perumusan Repelita ke III nanti. Semuanya ini bukan hal yang baru. Yang penting ialah kesadaran kita bahwa pilihan dan perumusan tujuan-tujuan pembangunan, yaitu masyarakat

adil dan makmur dimana keadilan sosial disebut lebih dahulu daripada kemakmuran, dan kemakmuran tidak dilihat lepas dari keadilan, mencerminkan sistim nilai bangsa Indonesia.

Didalam pelaksanaan pembangunanpun kita pada setiap langkah dihadapkan dengan pilihan-pilihan mengenai cara dan sarana pelaksanaan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan moril yang tidak dapat dilepaskan dari sistim nilai kita. Setiap keputusan sudah barang tentu berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis dan teknis. Namun, tidak boleh tidak keputusan itu baru dianggap tepat dan didukung oleh masyarakat jikalau dirasakan sesuai oleh masyarakat luas dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu. Sebab setiap keputusan menghadapkan kita dengan pertanyaan siapa atau golongan mana didalam masyarakat kita akan menarik manfaat dari keputusan itu, golongan mana yang akan dirugikan, dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, dan apa akibat keputusan itu atas perubahan strukturil masyarakat Indonesia yang di cita-citakan. Apakah suatu proyek tertentu akan memperkuat golongan yang sudah kuat dan memperlemah yang sudah lemah, atau sebaliknya, atau apakah suatu proyek tertentu dapat mengurangi dualisme ekonomi yang kita warisi dari jaman kolonial dan feodal ?

Pilihan apakah yang akan kita utamakan disuatu daerah tertentu, misalnya rehabilitasi atau perluasan kereta api, ataukah highway, atau jalan biasa, atau pilihan teknologi yang akan dipakai, tidak dapat kita adakan hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomis atau teknis semata-mata. Ia memerlukan juga pertimbangan-pertimbangan daripada implikasi-implikasi sosial dan moril, dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan moril pokok daripada usaha pembangunan kita. Demikian juga pilihan misalnya, berapa daripada sumber-sumber daya kita (resources) akan kita arahkan untuk produksi konsumtif dan berapa untuk tujuan-tujuan produktif; berapa untuk pengembangan sektor modern dan berapa untuk sektor tradisionil, berapa untuk fasilitas-fasilitas perusahaan modern yang besar dan berapa untuk dunia usaha kecil ? Semua ini memerlukan, disamping tindakan-tindakan ekonomis dan teknis, kemampuan untuk menyadari dan mempertimbangkan implikasi-implikasi moril, sosial dan politik. Maka perlulah dipupuk kemampuan kita untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan moril dalam menghadapi masalah-masalah ekonomis dan teknis konkrit didalam usaha pembangunan kita. Begitupun mengenai cara-cara pembangunan. Setiap taraf pembangunan memerlukan cara2 pelaksanaan tersendiri.

Dalam taraf pertama, mungkin sekali yang paling diperlukan ialah mobilisasi dana dan daya dari atas. Di dalam taraf-taraf berikutnya berangsur-angsur akan diperlukan cara-cara pelaksanaan yang mengutamakan partisipasi dan inisiatif dan "decision making" oleh masyarakat sendiri. Memang hal-hal itu yang dituju oleh perjuangan bangsa. Maka usaha pembangunan, baik dalam tujuannya maupun dalam cara-cara pelaksanaannya, tidak dapat dilepaskan dari sistim nilai dan moralitas pokok suatu bangsa. Suatu usaha pembangunan yang oleh masyarakat luas tidak dianggap sesuai dengan nilai-nilai pokoknya, tidak akan mendapat dukungan dan akan gagal. Pada pokoknya usaha pembangunan tidak dapat berhasil dalam suatu vacuum moral.

Kita juga telah menyadari bahwa usaha pembangunan mau tak mau membawa efek sampingan yang kadang-kadang memperkuat gerak maju ke arah tujuan-tujuan pembangunan itu, biarpun tidak sengaja, tapi sering juga membawa efek sampingan yang merugikan. Kesiapan untuk menghadapi efek-efek sampingan yang negatif dan untuk mengatasinya memerlukan, pertama pengertian ekonomis dan teknis, tapi juga kematapan moral untuk mengadakan pilihan-pilihan yang sulit. Jelas bahwa usaha pembangunan memerlukan penilaian terus menerus sehingga dapat diadakan koreksi seperlunya. Disinilah pentingnya Pancasila, bukan saja sebagai filsafah negara, tapi juga sebagai batu ujian konkrit terhadap langkah-langkah pertumbuhan masyarakat. Dalam menilai perkembangan-perkembangan, dalam mengevaluasi setiap usaha pembangunan, sudah sepatutnya kita bertanya, apakah dan sampai dimanakah suatu proyek atau program kebijaksanaan sesuai dengan, dan memperkuat penjelmaan sosial kelima sila didalam Pancasila, dan apa yang harus dikerjakan atau dirubah dalam program atau proyek yang bersangkutan agar supaya sila-sila itu dapat diperkuat perwujudannya didalam masyarakat. Dalam pada itu, jelaslah suatu penilaian moral se-mata-mata tidak cukup untuk hanya menolak suatu kebijaksanaan atau program tertentu. Perlu juga penilaian itu disertai dengan alternatif konkrit dan realistis, yang lebih sesuai dengan patokan-patokan moral yang dipegang itu.

Sebab sesuai dengan kodrat manusia dalam alam dunia ini, jarang sekali didalam kehidupan masyarakat kita berhadapan dengan pilihan-pilihan moril antara hitam dan putih saja. Sering kita harus memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang masing-masing mempunyai aspek-aspek moril yang negatif. Hal itu misalnya jelas sekali dalam usaha-usaha untuk memobilisasi dana-dana untuk pembangunan.

Kembali kepada perubahan-perubahan sosial, disamping perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh usaha pembangunan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kita juga mengalami perubahan-perubahan sosial yang fundamental yang nampak dalam jangka panjang, yang tidak disengaja atau yang tidak seluruhnya disengaja dan tidak seluruhnya dikuasai oleh pemerintah dan masyarakat. Perubahan-perubahan itu mempunyai akibat atas usaha pembangunan kita itu sendiri, tapi juga turut merubah sistim nilai kita sendiri serta struktur-struktur sosial yang mendukungnya. Perubahan-perubahan itu ialah misalnya perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk secara pesat, proses urbanisasi dan erosi tanah, perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh pengaruh teknologi, pengaruh peningkatan kecerdasan dan kesadaran politik masyarakat peningkatan ketrampilan serta peningkatan pengaruh luar negeri dan komunikasi media elektronis. Impact perubahan-perubahan sosial ini atas sistim nilai kita memaksakan kita untuk kembali kepada sumber-sumber sistim nilai itu dan dari situ untuk mewujudkan kembali suatu konfigurasi nilai-nilai yang pada satu pihak menjamin kelangsungan kepribadian kita sebagai bangsa, dan pada pihak lain relevan dan mampu bicara dengan situasi dan keadaan masyarakat yang baru dan sedang beralih terus menerus.

Perubahan2 ini maupun perubahan2 yang diakibatkan oleh pembangunan tidak hanya meliputi struktur masyarakat serta struktur2 sosial setempat. Mereka juga meliputi lingkungan hidup, lingkungan kerja dan keadaan manusia2 pribadi. Patokan2 lama yang mengatur tata hidup manusia sering se-olah2 tidak berlaku lagi atau tidak kena lagi; pekerjaan yang biasa dilakukan kadang2 ditiadakan karena perubahan2 itu dan pekerjaan baru memerlukan ketrampilan lain yang sering belum dimiliki orang yang bersangkutan; sering juga ia terpaksa pindah tempat dan mulai usaha baru dalam keadaan baru, yang lain sama sekali dari yang dikenalnya. Pada umumnya kepastian yang biasanya meliputi kehidupannya sudah tidak ada lagi dan kepastian baru yang dapat memberi ketentraman jiwa kepadanya, belum jelas.

Maka perubahan2 sosial sering disertai oleh rasa tidak menentu, oleh kegelisahan dan kekuatiran pada tingkat individuil. Semuanya ini memaksakan manusia untuk mendudukan diri kembali didalam keadaan yang serba baru. Dan dia terpaksa mencari kembali patokan2 bagi kelakukannya sebagai warga negara, warga komunitas baru dan sebagai manusia pribadi.

Yang hendak dijelaskan dengan uraian ini ialah bahwa baik penentuan tujuan2 pembangunan, maupun pelaksanaan usaha pembangunan, tapi juga kegelisahan2 dan ketidak tentuan yang mau tak mau menyertai perubahan2 sosial yang luas dan mendalam ini, semuanya menghadapkan manusia kembali dengan dirinya sebagai manusia susila dan mempertanyakan kembali makna dan arti hidupnya.

Penghadapan ini berkisar disekitar nilai2 dan konfigurasi nilai2 yang dipegangnya dan yang, untuk sebagian penting umat manusia, pada hakekatnya bersumber pada agama. Maka mau tak mau seorang beragama terpaksa merenungkan arti pembangunan dan perubahan-perubahan sosial yang dialaminya, serta kelakuannya

sendiri didalam keadaan baru ini dari perspektif imannya. Karena iman manusia mampu dan harus melihat perkembangan kejadian didunia ini, terasuk perkembangan masyarakatnya sendiri, dibawah cahaya Nur Illahi.

Karena iman, manusia mampu untuk membangun sambil menjaga hukum keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, sehingga dia tidak terhanyut dalam pengejaran kebendaan dan materialisme yang berlebihan.

Iman membuahkkan amal menurut kaidah-kaidah syariat agama. Usaha pembangunan pada hakekatnya merupakan perluasan amal kita itu menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan, bukan hanya pada tingkat individual, melainkan sebagai masalah struktural masyarakat. Maka karena imannya manusia beragama terdorong untuk turut melaksanakan pembangunan.

Dalam pada itu manusia beragama dan umat beragama memerlukan kemampuan untuk mengadakan pilihan-pilihan antara berbagai jalan yang sering semuanya ada biaya moralnya, biarpun berbeda-beda. Ia harus dapat mengadakan pilihan-pilihan itu sedapat-dapatnya sesuai dengan patokan patokan moralnya yang pokok, yang telah diselami dan dihayati kembali. Dia harus memilih antara yang halal dan haram, antara yang hak dan batil. Maka dia cukup hanya mengenali achlak, tapi harus mencoba menghayati achlak dalam menghadapi keadaan konkrit yang baru.

Dalam mengadakan pilihan-pilihan itu sudah barang tentu, ia juga memerlukan akal dan ilmu, pengertian rasionil tentang proses-proses perubahan sosial yang dihadapinya, serta tentang implikasi-implikasi sosial daripada pilihan-pilihan yang terbuka baginya oleh ilmu pengetahuan modern.

Pemupukan kemampuan-kemampuan ini agaknya juga merupakan tujuan pendidikan agama, dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Pendidikan agama hendaknya bukan saja berusaha meningkatkan kesadaran beragama, melainkan juga meningkatkan kemampuan bangsa untuk

melihat pembangunan itu dalam perspektif transcendental, untuk melihat iman sebagai sumber motivasi pembangunan dan untuk menturut sertakan iman dalam menyelami dan menghayati ilmu pengetahuan modern. Demikianlah dapat ditingkatkan kemampuan bangsa untuk mengawinkan akan dan akhlak dalam menghadapi masalah2 pembangunan, atau dengan kata lain, untuk meningkatkan kemampuan bangsa untuk menjalankan "moral reasoning", atau lebih khusus, untuk meningkatkan kemampuan umat untuk ber ijtihad, untuk menguji keadaan dan kelakuan yang memerlukan suatu pertimbangan baru oleh karena ketentuan yang ada tidak mengaturnya.

Tugas pendidikan agama sudah barang tentu tidak terbatas pada kaitannya dengan usaha pembangunan bangsa pada keseluruhannya. Juga pada tingkat manusia pribadi, pendidikan agama didalam suatu masa pembangunan dan suatu masa peralihan, mempunyai tugas penting.

Sudah barang tentu tugas semua pendidikan ialah membina manusia susila, manusia yang berakhlak. Akan tetapi pendidikan agama dalam suatu masa perubahan sosial mempunyai tugas khusus, dalam arti pembinaan anak didik untuk berkelakuan yang benar didalam suatu situasi yang tidak menentu patokan2 moralnya. Karena perubahan atau kehancuran struktur2 sosial lama, dan timbulnya keadaan2 baru, maka lebih dari dulu kita perlukan manusia2 yang mempunyai keberanian hidup, yang bersedia dan mampu berdiri diatas kaki sendiri dan mencari nafkah sendiri, dan tidak menggantungkan nasibnya kepada pemerintah

atau birokrasi² besar². Imanlah yang dapat memberikan kepada manusia keberanian hidup itu. Ia juga dapat memberikan kepadanya keberanian dan kemantapan moril untuk menolak peluang² yang gampang namun tidak becus, biarpun kelihatan aman dan biarpun dipakai orang banyak, dan untuk tetap menganbil jalan yang lurus, betapapun sulitnya jalan itu. Sebenarnya, dalam pendidikan agama di Indonesia, memang demikian tradisinya. Didalam berbagai pesantren² sikap ini masih tetap dipupuk, seperti diantaranya di Gontor; sikap hidup semacam itu tetap dibina dengan mengutamakan kesanggupan untuk hidup sederhana dan untuk kerja sendiri. Juga dalam sejarah Muhammadiyah dahulu para calon mubaligh dididik berdasarkan doktrin bahwa mereka hendaknya "menghidupi Muhammadiyah", dan tidak "mencari hidup dari Muhammadiyah". Maka sangat harus diharapkan supaya usaha mempersamakan bahan pendidikan umum didalam sekolah agama dan tempat pendidikan agama, tidak akan menghancurkan semangat self-reliance ini, melainkan dipertebal dengan meningkatkan bekal ketrampilan² baru yang lebih sesuai dengan keperluan dan peluang didalam usaha pembangunan ini. Usaha pembangunan kita juga memerlukan manusia² yang berani mengambil prakarsa dengan segala risikonya, tanpa menunggu perintah, sebagai ikhtiar manusia yang diamanatkan dan difirmankan oleh Tuhan. Disamping itu manusia yang beriman mengetahui bahwa apapun kedudukan, pangkat, kekayaan dan kekuasaannya, dihadapan Tuhan semua manusia merupakan mahluk yang sama, yang sama sederajat.

Dan kesadaran ini tercermin didalam tingkah laku orang beriman, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesama manusia. Dorongan kearah pendemokrasian struktur sosial yang berakar kepada iman ini, merupakan suatu nilai penting yang harus dipupuk oleh pendidikan agama dalam usaha kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Seperti sudah dikemukakan, dalam usaha pembangunan yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada, tetapi juga kemampuan untuk menilai kenyataan-kenyataan sosial itu berdasarkan kriteria yang ditarik dari suatu sistim nilai. Pembentukan akhlak dalam program-program pendidikan agama lazimnya berupa pelajaran tentang norma-norma atau kaidah-kaidah yang hendaknya kita taati dalam hidup kita. Melalui berbagai mata pelajaran (misalnya Adab, Fikh, Tarich, Tauhid, Al-Qur'an dan Hadits dalam pendidikan Agama Islam), pendidikan agama pada dasarnya berusaha membekali para anak didik dengan seperangkat nilai, seperangkat norma, yang diharapkan akan merupakan pegangan hidup mereka dikemudian hari. Nilai-nilai ini lazimnya diajarkan dalam bentuk-bentuk yang abstrak, yang relevansinya terhadap kenyataan-kenyataan sosial tidak mudah ditangkap oleh para anak didik, terutama oleh mereka yang belum cukup memiliki pengalaman-pengalaman sosial. Untuk keperluan pembangunan, pendidikan agama akan memenuhi suatu fungsi yang sangat vital, kalau ia berusaha untuk menanamkan motivasi yang kuat pada para anak didik untuk menghubungkan nilai-nilai yang mereka pelajari dengan kenyataan-kenyataan sosial yang ada. Dengan demikian para anak didik didorong untuk bersikap kritis dan kreatif dalam menghadapi kenyataan-kenyataan sosial tadi.⁺⁾

Demikianlah pendidikan agama akan dapat memenuhi fungsinya dalam proses pembangunan, apabila ia mampu menggerakkan para anak-didik untuk belajar mengamalkan ajaran-ajaran agama yang mereka terima

+) Dengan jalan ini pendidikan agama juga dapat menyumbang pada pemupukan toleransi antar-agama dan peningkatan kerjasama antar-agama dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Pendidikan agama dan toleransi antar agama merupakan suatu masalah penting yang memerlukan pembahasan tersendiri, dan oleh karena itu tidak dibicarakan didalam kertas kerja ini.

kedalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan agama yang hanya menekankan penghafalan kaidah-kaidah keagamaan dalam bentuk yang abstrak-steril kurang mempunyai relevansi terhadap usaha mengelola perubahan-perubahan sosial melalui berbagai usaha pembangunan dan untuk membina anak-didik untuk menghadapi masa peralihan ini secara positif, sebagai manusia susila.

Jelas agaknya, bahwa pendidikan agama seperti yang dimaksudkan ini tidak dapat dan tidak boleh berjalan sendiri. Kalau pendidikan agama ingin mempunyai relevansi terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat, ia harus berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umum, tetapi berlaku pula bagi program pendidikan agama yang diselenggarakan di-sekolah-sekolah yang pada dasarnya bersifat sekolah-sekolah keagamaan. Alasan fundamental yang mendasari pendapat ini ialah, bahwa setiap program pendidikan -- selama program itu pantas disebut sebagai "program pendidikan" -- pada akhirnya bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang susila, manusia-manusia yang berakhlak. Alasan yang lebih pragmatis sifatnya, ialah bahwa kemampuan untuk menilai kenyataan-kenyataan sosial secara normatif, dan kemampuan untuk memikirkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki suatu keadaan tertentu akan lebih cepat dan lebih mudah dibina apabila ada semacam interaksi antara program-program pendidikan agama dengan program-program pendidikan non-agama. Apabila kerjasama atau sinkronisasi semacam ini tidak diusahakan, harus dikhawatirkan bahwa pendidikan agama, terutama di sekolah-sekolah umum, hanya akan menjadi "hiasan kurikulum" belaka. Artinya : kehadirannya dalam kurikulum hanyalah untuk memuaskan keinginan kelompok kaum agama saja, dan tidak untuk membantu terciptanya suatu generasi yang lebih mampu daripada generasi kita untuk mengelola perubahan² sosial dimasyarakat kita.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa pendidikan agama akan dapat memenuhi suatu fungsi yang sangat penting dalam perkembangan sosial yang akan datang di Indonesia, apabila ia (1) berusaha memupuk beberapa sifat tertentu diantaranya keberanian hidup, kesanggupan untuk berdiri diatas kaki sendiri dan untuk berinisiatif, peka terhadap hak dan keperluan sesamanya menuaia, dan sanggup kerjasama untuk kepentingan umum, didalam suatu proses perubahan sosial terus menerus, tanpa ketakutan akan perubahan itu; (2) berusaha untuk memupuk motivasi yang kuat pada para anak-didik untuk mempelajari dan memahami kenyataan-kenyataan sosial yang terdapat di masyarakat kita; (3) berusaha untuk merangsang para anak-didik untuk mengamalkan iman mereka; dan (4) berusaha untuk berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non-agama.
